



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa berkenaan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2017 terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 maka dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2017;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2019;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 2016 Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 02);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016);
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Nganjuk, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 15);
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 23);
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 27);

31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 11)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017.

Pasal I

Mengubah yang Kedua Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 pada Lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Perubahan RKPD Tahun 2017 ini menjadi acuan bagi para Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun program/kegiatan yang pendanaannya dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Agustus 2017

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Agustus 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Dinas Pertanian

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19661107 199403 1 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Penyusunan	I-3
1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan	I-6
BAB II EVALUASI REALISASI APBD TAHUN 2017 KABUPATEN NGANJUK SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA	II-1
2.1. Pengantar	II-1
2.2. Evaluasi Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan berdasarkan OPD	II-1
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN	III-1
3.1. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro	III-1
3.2. Kerangka Pendanaan	III-4
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN	III-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017	IV-3
BAB V RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN NGANJUK	V-1
BAB V PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2017	II -1
Tabel III .1	Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2017	III -4
Tabel III. 2	Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2017	III -6
Tabel III .3	Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2017	III -7
Tabel III. 4	Rekapitulasi Perubahan RKPD Tahun 2017 Berdasarkan OPD	III -8
Tabel V. 1	Rincian Plafon Anggaran Kecamatan Per Program Dan Kegiatan Perubahan Apbd Tahun Anggaran 2017	V -2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN
2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
NGANJUK TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu rangkaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun; dan
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota harus sejalan dengan proses penyusunan perencanaan pada tingkat nasional maupun provinsi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 25, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara sehingga RKPD sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta APBD.

Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD Tahun 2017 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD Tahun 2017 berfungsi sebagai penjabaran RPJMD, khususnya tahun keempat ke dalam rencana operasional yang memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah,

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terjadi perubahan paradigma pemerintahan terutama terkait ketentuan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sehingga diharapkan dengan adanya perubahan paradigma tersebut tidak mengganggu kesinambungan pemerintahan yang akan berdampak pada proses pembangunan di daerah.

Terkait dengan adanya perkembangan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, maka Pemerintah Kabupaten Nganjuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2017.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2017) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2017. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah;
2. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah.
3. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, serta pasal 25 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan RAPBD Tahun 2017.

Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2017 Kabupaten Nganjuk. Perubahan RKPD Tahun 2017 ini dirasakan sangat penting untuk konsistensi dan keselarasan serta kesinambungan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk secara lebih efisien dan efektif. Pada sisi lain, penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2. Dasar Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017 Kabupaten Nganjuk didasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2017;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 - 2019;
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 2016 Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 02);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016);
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 75 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Nganjuk, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 15);
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 23);

30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 27).

1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

1.3.1. Maksud

Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Nganjuk terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2017. Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses pembangunan di Kabupaten Nganjuk di tahun 2017.

Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 tetap menjadi bagian utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018. Perubahan RKPD Tahun 2017 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2017.

1.3.2. Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2017. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
2. Diperolehnya perubahan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Nganjuk tahun 2017.

3. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Nganjuk Tahun 2017, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Tahun 2017 Kabupaten Nganjuk.

1.3.3. Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 perlu dilakukan didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan (2017) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah;
2. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah.
3. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, serta pasal 25 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan RAPBD Tahun 2017.

BAB II

EVALUASI REALISASI APBD TAHUN 2017 KABUPATEN NGANJUK SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

2.1. Pengantar

Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 sampai dengan triwulan kedua dilakukan melalui analisa capaian dengan indikator penyerapan anggaran program/kegiatan pada APBD Tahun 2017

Dengan menggunakan kurva normal, maka penentuan kategori indeks capaian juga terbagi menjadi 5 kategori yaitu: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Kelima kategori di atas dilakukan untuk menentukan kriteria dari pencapaian masing-masing misi.

Adapun kriteria kategori skala penilaian baru sebagai berikut:

- (1) Sangat Tinggi $\geq 47\%$
- (2) Tinggi $\geq 39\%$ - 46%
- (3) Sedang $\geq 34\%$ - 38%
- (4) Rendah $\geq 26\%$ - 33%
- (5) Sangat Rendah $\leq 25\%$

2.2. Evaluasi Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Berdasarkan OPD.

Evaluasi Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada tahun 2017 sampai bulan Mei 2017 didasarkan pada penyerapan anggaran program/kegiatan setiap OPD yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.1
Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2017

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu APBD (Rp)	Realisasi s.d Bln Mei 2017	
			Rp.	%
1	Dinas Pendidikan	91.185.004.540,00	9.213.109.245,00	10,10
2	Dinas Kesehatan	117.077.934.368,00	19.392.530.984,00	16,56
3	RSUD Nganjuk	128.388.000.000,00	59.365.317.683,00	46,24
4	RSUD Kertosono	55.800.000.000,00	16.307.408.158,00	29,22
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	259.208.462.600,00	1.217.062.723,00	0,47
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	25.940.200.000,00	710.293.258,00	2,74
7	Satuan Polisi Pamong Praja	4.418.830.900,00	1.572.070.395,00	35,58
8	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.497.200.000,00	297.247.690,00	19,85
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.653.999.000,00	672.130.862,00	14,44

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu APBD (Rp)	Realisasi s.d Bln Mei 2017	
			Rp.	%
10	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	6.159.987.000,00	2.326.741.999,00	37,77
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.362.435.000,00	263.718.765,00	19,36
12	Dinas Lingkungan Hidup	17.153.809.500,00	2.718.280.976,00	15,85
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.178.908.000,00	712.076.212,00	22,40
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.399.400.000,00	873.127.757,00	25,68
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.025.231.000,00	2.928.174.140,00	36,49
16	Dinas Perhubungan	27.593.718.600,00	7.863.055.036,00	28,50
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.797.200.000,00	198.506.839,00	5,23
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.519.500.000,00	784.783.835,00	31,15
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.420.000.000,00	929.480.428,00	38,41
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan	4.207.360.000,00	1.042.179.000,00	24,77
21	Dinas Pertanian	8.636.051.250,00	1.822.986.198,00	21,11
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.573.400.000,00	1.932.214.604,00	25,51
23	Sekretariat Daerah			
	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.779.850.000,00	851.512.989,00	12,56
	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	1.103.000.000,00	347.978.500,00	31,55
	Asisten Administrasi Umum	12.254.456.500,00	2.833.089.589,00	23,12
24	Sekretariat DPRD	35.973.521.600,00	9.377.126.451,00	26,07
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.392.600.000,00	624.418.383,00	26,10
26	Inspektorat Daerah	1.936.825.000,00	537.321.540,00	27,74
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.515.140.500,00	1.416.822.701,00	6,03
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.990.475.000,00	922.766.043,00	18,49
29	Badan Pendapatan Daerah	3.776.625.000,00	1.119.799.460,00	29,65
30	Badan Kepegawaian Daerah	4.773.295.000,00	1.405.340.996,00	29,44
31	Kecamatan Bagor	852.723.900,00	268.612.961,00	31,50
32	Kecamatan Baron	310.536.400,00	103.799.508,00	33,43
33	Kecamatan Berbek	358.190.200,00	99.485.188,00	27,77
34	Kecamatan Gondang	363.670.800,00	113.502.774,00	31,21
35	Kecamatan Jatikalen	322.209.700,00	151.110.952,00	46,90
36	Kecamatan Kertosono	762.899.200,00	337.164.951,00	44,20
37	Kecamatan Lengkon	366.581.500,00	183.367.488,00	50,02
38	Kecamatan Loceret	391.096.400,00	159.137.104,00	40,69
39	Kecamatan Nganjuk	977.102.500,00	610.052.000,00	39,08
40	Kecamatan Ngetos	425.561.600,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Ngluyu	328.651.200,00	144.993.770,00	44,12
42	Kecamatan Ngronggot	382.334.000,00	145.971.124,00	38,18
43	Kecamatan Pace	391.198.160,00	154.801.384,00	39,57
44	Kecamatan Patianrowo	472.024.000,00	110.178.534,00	23,34
45	Kecamatan Prambon	366.749.800,00	115.797.430,00	31,57
46	Kecamatan Rejoso	355.041.000,00	179.011.504,00	50,42
47	Kecamatan Sawahan	326.985.600,00	67.999.927,00	20,80
48	Kecamatan Sukomoro	937.392.100,00	342.443.604,00	36,53
49	Kecamatan Tanjunganom	1.526.286.600,00	155.297.397,00	10,17
50	Kecamatan Wilangan	318.364.800,00	95.398.181,00	29,97

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

Berdasarkan hasil laporan Bank Dunia pada Tribulan I Tahun 2017, perekonomian global diperkirakan relatif tenang, setelah di tahun 2016 bergejolak hampir sepanjang tahun. Hasil referendum keikutsertaan Inggris dalam Uni-Eropa pada bulan Juni 2016 dan pemilihan presiden AS di bulan November 2016 menyebabkan (pasar) keuangan secara tiba-tiba bergejolak. Namun setelah itu, meskipun dalam ketidakpastian kebijakan dan meningkatnya sentimen proteksionisme, pasar keuangan global berangsur membaik dan mendukung aktivitas perekonomian global. Pertumbuhan perekonomian global diperkirakan akan meningkat tahun ini, dengan PDB riil meningkat sebesar 2,7 persen secara global, naik dari posisi pasca krisis sebesar 2,3 persen di tahun 2016. Karena harga komoditas terus pulih dan tantangan domestik yang menurun di beberapa negara eksportir komoditas, negara pasar berkembang dan negara berkembang (*commodity exporters, emerging and developing economies*) akan memimpin pulihnya tingkat pertumbuhan global, dengan pertumbuhan meningkat 4,2 persen pada tahun 2017.

Kegiatan ekonomi di negara-negara maju juga diharapkan akan tumbuh lebih cepat tahun ini, mencapai 1,8 persen, yang dipimpin oleh pertumbuhan ekonomi AS yang secara signifikan lebih kuat. Capaian ini nampak dari *Purchasing Manager's Index* (PMI) di bulan Januari dan Februari 2017 yang mendukung perkiraan pertumbuhan global yang optimis, dengan capaian produksi multi-tahunan yang tinggi pada negara-negara di dunia dan di negara-negara dengan ekonomi kuat.

Sementara itu kondisi perekonomian dalam negeri menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB riil pada tahun 2016 sedikit menurun menjadi 4,9 persen *year-to-year* di Tribulan IV dari 5,0 persen di Tribulan III, terutama disebabkan oleh kontraksi pada konsumsi pemerintah dan impor yang meningkat. Didukung oleh inflasi yang rendah dan nilai Rupiah yang relatif stabil, pertumbuhan konsumsi sektor swasta tetap stabil di Tribulan IV. Inflasi harga konsumen tahunan meningkat pada dua bulan pertama tahun 2017, meningkat menjadi 3,5 persen di bulan Januari dan 3,8 persen di bulan Februari. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan tarif listrik dan biaya pajak kendaraan bermotor, yang menyebabkan harga komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah naik 3,4 persen *year-to-year* pada bulan Januari dan 4,7 persen pada Februari, dari 0,2 persen pada bulan Desember 2016. Setelah adanya reformasi Pemerintah untuk mengurangi subsidi listrik, 18,7 juta pelanggan pada kategori listrik

900VA akan terkena kenaikan tarif listrik bertahap setiap dua bulan mulai bulan Januari sampai Mei tahun ini. Pada bulan Juli 2017, 18,7 juta pelanggan tersebut, yang mewakili 29 persen dari jumlah total pelanggan listrik, akan membayar skema tarif swa-penyesuaian (*auto-adjusted*) standar.

Inflasi inti yang tidak termasuk harga yang lebih tidak stabil seperti makanan dan bahan bakar minyak, juga meningkat, merayap hingga 3,4 persen pada bulan Januari dan Februari 2017 dari 3,1 persen pada bulan Desember 2016. Sementara itu, inflasi pangan terus menurun, dari 5,7 persen pada bulan Desember 2016 menjadi 4,4 persen pada bulan Februari 2017, terutama karena kontribusi yang lebih rendah dari makanan olahan, yang meliputi harga beras yang relatif stabil dikarenakan hasil panen yang baik karena cuaca yang menguntungkan di tahun 2016.

Efek inflasi dari kenaikan tarif listrik di akhir bulan Mei dan masa Lebaran di bulan Juni diperkirakan akan mencapai puncaknya di Tribulan III 2017. Naiknya harga minyak dunia juga diperkirakan akan berkontribusi untuk biaya produksi dan transportasi yang lebih tinggi. Namun demikian, efek inflasi tersebut akan sebagian diimbangi oleh penurunan lebih lanjut dalam inflasi di sektor makanan, yang dikontribusikan oleh panen raya padi yang diharapkan terjadi pada semester pertama tahun 2017. Bank Dunia memperkirakan tingkat inflasi IHK tahunan rata-rata meningkat 4,3 persen di tahun 2017, sebelum kemudian menurun ke 3,8 persen di 2018, dan tetap berada dalam kisaran target inflasi Bank Indonesia sebesar 3 sampai 5 persen.

Tantangan yang dihadapi Pemerintah dalam merumuskan asumsi ekonomi makro Nasional banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti beberapa risiko bagi proyeksi pertumbuhan termasuk perubahan tak terduga dari kebijakan monter Amerika Serikat, ketidakpastian politik Eropa, inflasi domestik yang lebih tinggi dari perkiraan, serta pendapatan fiskal yang rendah

Asumsi dasar yang disepakati Pemerintah dan DPR dalam RAPBN-P 2017 Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dan inflasi sebesar 4,3 persen, nilai tukar rupiah Rp 13.400 per dollar Amerika Serikat (AS), dan tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 5,2 persen. Sedangkan harga minyak mentah 45 dollar AS per barel, lifting minyak bumi 815 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1,15 juta barel setara minyak per hari.

Postur RAPBN-P 2017 secara umum dapat dirinci sebagai berikut:

- Postur RAPBN-P 2017 dengan proyeksi pencapaian defisit anggaran sebesar 2,92% terhadap PDB atau sekitar Rp 397,2 triliun. Defisit anggaran tersebut melebar dari proyeksi dalam APBN 2017 sebesar 2,41% terhadap PDB atau hampir mendekati batas yang diperkenankan dalam Undang-undang yaitu 3%

terhadap PDB. Perkiraan defisit anggaran tersebut berasal dari target pendapatan Negara dalam RAPBNP 2017 sebesar Rp 1.714,1 triliun atau mengalami penurunan dari target APBN sebesar Rp 1.750,5 triliun;

- Pagu belanja negara dalam RAPBN-P 2017 diproyeksikan Rp 2.111,4 triliun atau meningkat dari pagu APBN 2017 sebesar Rp 2.080,5 triliun. Meski target defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,92% terhadap PDB, pemerintah meyakini terdapat penghematan alamiah dari postur RAPBN-P 2017 yang bisa menekan target defisit anggaran tersebut. Penghematan alamiah itu berasal dari belanja Kementerian/Lembaga, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa, sehingga proyeksi pada akhir 2017 defisit anggaran berada pada kisaran 2,67% terhadap PDB. Secara keseluruhan, penyerapan pagu belanja pemerintah pusat hanya berada pada kisaran 96-97% pada akhir 2017.

Dengan melihat kondisi perekonomian nasional dan berdasarkan postur APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 dan kondisi makro ekonomi Kabupaten Nganjuk sampai tribulan pertama tahun 2017 maka diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk tahun 2017 mencapai 5,1-5,5%. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Nganjuk sampai akhir tahun 2017 sedikit banyak juga dipengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017. Pada Tahun 2017 target pertumbuhan ekonomi nasional adalah 5,2%. Target pertumbuhan ekonomi tersebut masih optimistis bisa dicapai apabila melihat capaian pertumbuhan ekonomi sampai dengan kuartal I 2017 yang hanya mencapai 5,01%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2016 yang mencapai 4,9%. Perkembangan positif seperti perbaikan kinerja ekspor dan impor, serta kinerja sektoral yang diperkirakan semakin meningkat dipercaya memberikan optimisme terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN di periode ke depan.

Seiring dengan itu, percepatan implementasi paket kebijakan pemerintah, khususnya upaya untuk meningkatkan daya saing dan iklim investasi, diharapkan akan dapat meningkatkan investasi dan ekspor hal ini perlu mendapatkan dukungan dari seluruh level Pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun daerah.

Pertumbuhan ekonomi dunia sendiri pada Tahun 2017-2018 diperkirakan menuju arah perbaikan meskipun terdapat gejolak dan ketidakstabilan perekonomian di sejumlah negara maju terutama di zona eropa sebagai implikasi keputusan Inggris untuk keluar dari Uni-Eropa dan perlambatan ekonomi di negara berkembang.

Sasaran pembangunan ekonomi salah satunya adalah menjaga daya beli dengan stabilitasi harga atau pengendalian harga. Pada tingkat kabupaten, pengendalian harga juga sangat strategis mengingat dampak globalisasi maupun terpaan gejolak ekonomi regional maupun nasional juga berpengaruh sampai ke

daerah. Sisi lain pengendalian harga adalah untuk mendapatkan suasana kondusif bagi pertumbuhan produksi serta aktivitas ekonomi lainnya. Kabupaten Nganjuk masih sebagai basis pertanian berupaya meningkatkan produksi pertanian agar persediaan/cadangan pangan masyarakat tetap stabil disamping upaya menggerakkan dan meningkatkan investasi sebagai salah satu sektor strategis pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk hingga Triwulan IV 2016 juga menunjukkan tren positif mencapai 5,22%; meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,18%. Hal ini terjadi karena dukungan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi sekunder dan tersier seperti industri pengolahan, konstruksi dan perdagangan. Sedangkan tingkat inflasi hingga akhir tahun 2016 mencapai 5,14%. Berdasarkan keadaan tersebut diperkirakan inflasi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 terkendali di kisaran 5,1% - 5,5%.

3.2. Kerangka Pendanaan

3.2.1. Perubahan Pendapatan

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada: a) penyesuaian PAD (perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai serta realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2017); b) penyesuaian kebijakan dana perimbangan; c) penyesuaian alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan d) penyesuaian pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) RSUD Kabupaten Nganjuk. Proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel III.1 sebagai berikut:

Tabel III.1.
Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2017

No.	Uraian	APBD 2017 (Rp)	R-PAPBD 2017 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	%
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	308.555.890.313,00	328.393.009.594,28	19.837.119.281,28	6,43
1.1.1	Pajak Daerah	67.395.846.000,00	74.687.702.000,00	7.291.856.000,00	10,82
1.1.2	Retribusi Daerah	24.005.827.865,00	24.675.218.869,00	669.391.004,00	2,79
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.586.543.722,00	3.336.543.722,00	(250.000.000,00)	(6,97)
1.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	213.567.672.726,00	225.693.545.003,28	12.125.872.277	5,68
1.2	Dana Perimbangan	1.601.995.626.378,00	1.550.270.087.354,00	(51.725.539.024,00)	(3,23)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	77.770.171.000,00	61.651.410.354,00	(16.118.760.646,00)	(20,73)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.137.289.603.378,00	1.059.746.429.000,00	(77.543.174.378,00)	(6,82)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	386.935.852.000,00	428.872.248.000,00	41.936.396.000,00	10,84
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	333.237.458.180,00	481.377.760.934,00	148.140.302.754,00	44,45
1.3.1	Hibah	8.556.789.600,00	110.219.069.600,00	101.662.280.000,00	1.188,09
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	109.470.361.580,00	150.186.304.334,00	40.715.942.754,00	37,19

No.	Uraian	APBD 2017 (Rp)	R-PAPBD 2017 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	215.210.307.000,00	215.210.307.000,00	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	5.762.080.000,00	5.762.080.000,00	100,00
1.3.6	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.243.788.974.871,00	2.360.040.857.882,28	116.251.883.011,28	5,18

Berdasarkan Tabel III.1 di atas terlihat bahwa komposisi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

- ***Pajak Daerah***

Untuk pendapatan yang bersumber dari pajak daerah diproyeksikan mengalami kenaikan dari target sebesar Rp. 67,39 miliar menjadi Rp. 74,69 miliar atau kurang lebih naik 10,82%. Sumber pendapatan pajak daerah antara lain dari pajak hotel, pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak dan Bangunan atas Tanah, Pajak Reklame dan PBB P2.

- ***Retribusi Daerah***

Untuk Pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah diproyeksikan naik 2,79% dari target APBD 2017 yaitu sebesar Rp. 24 miliar menjadi Rp. 24,67 miliar.

- ***Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.***

Untuk pendapatan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan turun sebesar 6,97% atau Rp. 250 juta.

- ***Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.***

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan dari target sebesar Rp. 213,56 miliar menjadi Rp. 225,69 miliar atau naik 5,68%. Komponen Lain-lain PAD yang Sah terdiri atas pendapatan bunga deposito dari PT Bank Jatim dan PT Bank BRI, Jasa Giro Kas Daerah; dan pendapatan PPK BLUD RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono serta Kapitasi BPJS.

2. Dana Perimbangan

Penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dari pagu sebesar Rp. 1,60 triliun menjadi Rp. 1,55 triliun, diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 3,23%, terutama berasal dari dampak pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2016 sebesar kurang lebih 6,82%. Sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak diproyeksikan turun 20,73% dari target 2017 sebesar Rp. 77,77 miliar menjadi Rp. 61,65 miliar.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Penerimaan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari target Rp. 333,23 miliar menjadi Rp. 110,22 miliar naik sebesar 1.188,09%, yang berasal dari pengalihan Dana BOS dari belanja langsung menjadi belanja tidak langsung (hibah) sesuai amanat Permendagri No. 31 Tahun 2016, dari pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya.

3.2.2. Perubahan Belanja

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada penyesuaian dengan kebijakan terutama yang terkait dengan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD; program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian target program dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan; serta program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Untuk lebih jelasnya mengenai proyeksi perubahan belanja daerah Tahun 2017 dapat terlihat pada Tabel III.2 sebagai berikut:

Tabel III.2.
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2017

No.	Uraian	APBD 2017 (Rp)	R-PAPBD 2017 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	%
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.448.492.645.431,00	1.467.405.372.997,00	18.912.727.566,00	1,31
2.1.1	Belanja Pegawai	1.048.315.820.353,00	1.024.685.030.419,00	(23.630.789.934,00)	(2,25)
2.1.2	Belanja Bunga			-	
2.1.3	Belanja Subsidi			-	
2.1.4	Belanja Hibah	28.820.112.000,00	59.741.412.500,00	30.921.300.500,00	107,29
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12.915.800.000,00	15.216.800.000,00	2.301.000.000,00	17,82
2.1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.963.160.000,00	7.656.777.000,00	693.617.000,00	9,96
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	344.405.881.980,00	353.033.481.980,00	8.627.600.000,00	2,51
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	7.071.871.098,00	7.071.871.098,00	-	-
2.2	Belanja Langsung	904.550.289.818,00	1.118.052.490.111,00	213.502.200.293,00	23,60
2.2.1	Belanja Pegawai				
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa				
2.2.3	Belanja Modal				
	Jumlah Belanja	2.353.042.935.249,00	2.585.457.863.108,00	232.414.927.859,00	9,88

Berdasarkan Tabel III.2 di atas terlihat bahwa proporsi belanja pada APBD Tahun Anggaran 2017 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 2,353 triliun setelah Perubahan belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,585 triliun atau naik sebesar 9,88%; yang terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Untuk belanja tidak langsung, dari rencana sebesar Rp. 1,448 triliun naik sebesar 1,31% menjadi Rp. 1,467 triliun. Perubahan belanja tersebut sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai diproyeksikan turun 2,25% daripada APBD 2017, dari Rp. 1,048 triliun menjadi Rp. 1,024 triliun; rasionalisasi cadangan gaji K1, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, serta tambahan anggaran untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN;
- b. Belanja Hibah dari Rp. 28,82 miliar menjadi Rp. 59,74 miliar naik sebesar 107,29%, termasuk hibah pengamanan Pilkada.
- c. Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan naik 17,82% dari APBD 2017, dari Rp. 12,91 miliar menjadi Rp. 15,22 miliar.
- d. Belanja Bagi Hasil kepada Pemprov/kab/kota dan Desa diproyeksikan naik 9,96%.
- d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari rencana sebesar Rp. 344,40 miliar menjadi Rp. 353,03 miliar atau naik 2,51%.
- e. Belanja Tak Terduga dari rencana sebesar Rp. 7,07 miliar diproyeksikan sama dengan anggaran induk 2017.

Tambahan anggaran untuk belanja langsung diperlukan dalam rangka membiayai program kegiatan setiap OPD maupun pencapaian target kinerja program kegiatan urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Daerah; dari anggaran semula sebesar Rp. 904,55 miliar menjadi Rp. 1,118 triliun, naik sebesar 23,60%. Tambahan anggaran tersebut merupakan belanja langsung kegiatan baru, maupun tambahan dana dari kegiatan yang sudah ada yang sumber dananya dari bantuan keuangan provinsi, Sisa kegiatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT), BLUD, Kapitasi BPJS, SiLPA TA 2016 serta tambahan pendapatan lainnya.

3.2.3. Perubahan Pembiayaan

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya peningkatan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2016 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada: penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA.

Secara lebih detail berkaitan dengan proyeksi perubahan pembiayaan daerah tahun 2017 terlihat pada Tabel III.3 sebagai berikut:

**Tabel III.3.
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2017**

No.	Uraian	APBD 2017	R-PAPBD 2017 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	%
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA sebelumnya	119.503.960.378,00	234.330.586.924,84	114.826.626.546,84	96,09

No.	Uraian	APBD 2017	R-PAPBD 2017 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)	%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian Pinjaman				
3.1.6	Penerimaan Piutang daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	119.503.960.378,00	234.330.586.924,84	114.826.626.546,84	96,09
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.250.000.000,00	10.250.000.000,00	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	10.250.000.000,00	10.250.000.000,00	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.250.000.000,00	10.250.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto	109.253.960.378,00	224.080.586.924,84	114.826.626.546,84	105,10

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa pada RKPD Perubahan Tahun 2017 pembiayaan netto mengalami surplus sebesar Rp 224,08 miliar. Dengan demikian dalam Perubahan RKPD 2017 ini terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 1,336 miliar.

3.2.4. Perubahan Anggaran Berdasarkan OPD

Plafon anggaran sementara berdasar OPD untuk belanja langsung dapat dilihat pada Tabel III.4 di bawah ini.

Tabel III.4.
Rekapitulasi Perubahan RKPD Tahun 2017 Berdasarkan OPD

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Plafon Anggaran		
		Sebelum Perubahan (Rp)	Perubahan 2017 (Rp)	Tambah/ (Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan Daerah	91.185.004.540	201.613.954.540	110.428.950.000
2	Dinas Kesehatan	117.077.934.368	173.844.741.568	56.766.807.200
3	RSUD Nganjuk	128.388.000.000	128.388.000.000	-
4	RSUD Kertosono	55.800.000.000	56.884.273.093	1.084.273.093
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	259.208.462.600	289.177.962.600	29.969.500.000
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	25.940.200.000	29.540.200.000	3.600.000.000
7	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik	1.497.200.000	1.807.200.000	310.000.000
8	Satuan Polisi Pamong Praja	4.418.830.900	4.968.830.900	550.000.000

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Plafon Anggaran		
		Sebelum Perubahan (Rp)	Perubahan 2017 (Rp)	Tambah/ (Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6.018.999.000	6.316.499.000	297.500.000
10	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Mikro	6.427.487.000	7.147.487.000	720.000.000
11	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	3.432.435.000	3.457.435.000	25.000.000
12	Dinas Lingkungan Hidup	17.153.809.500	18.492.209.500	1.338.400.000
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.178.908.000	3.178.908.000	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.399.400.000	3.624.400.000	225.000.000
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	8.025.231.000	8.035.231.000	10.000.000
16	Dinas Perhubungan	27.593.718.600	28.444.628.600	850.910.000
17	Dinas Kominfo	3.797.200.000	5.853.400.000	2.056.200.000
18	Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp	2.519.500.000	2.519.500.000	-
19	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	2.420.000.000	2.505.000.000	85.000.000
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga Dan Kebudayaan	8.332.900.000	8.332.900.000	-
21	Dinas Pertanian	8.636.051.250	8.861.051.250	225.000.000
22	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	7.573.400.000	8.349.560.000	776.160.000
23	Sekretariat Daerah	20.137.306.500	21.337.306.500	1.200.000.000
	Asisten Umum			
	Asisten Pem Dan Kesra			
	Asisten Ekbang			
24	Sekretariat DPRD	35.973.521.600	36.033.521.600	60.000.000
25	BPBD	2.392.600.000	2.392.600.000	-
26	Inspektorat Daerah	1.936.825.000	1.936.825.000	-
27	Bappeda	23.515.140.500	26.390.140.500	2.875.000.000
28	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	4.990.475.000	4.994.475.000	4.000.000
29	Badan Pendapatan	3.776.625.000	3.776.625.000	-
30	BKD	4.773.295.000	4.773.295.000	-
31	Kecamatan			
	1. Kecamatan Nganjuk	5.471.332.500	5.491.582.500	20.250.000
	2. Kecamatan Sukomoro	937.392.100	937.392.100	-
	3. Kecamatan Bagor	852.723.900	852.723.900	-
	4. Kecamatan Wilangan	318.364.800	318.364.800	-
	5. Kecamatan Berbek	358.190.200	359.940.200	1.750.000
	6. Kecamatan Loceret	391.096.400	391.096.400	-
	7. Kecamatan Ngetos	425.561.600	425.561.600	-
	8. Kecamatan Sawahan	326.985.600	326.985.600	-
	9. Kecamatan Tanjunganom	1.526.286.600	1.526.286.600	-
	10. Kecamatan Prambon	366.749.800	366.749.800	-
	11. Kecamatan Pace	391.198.160	391.198.160	-
	12. Kecamatan Kertosono	762.899.200	762.899.200	-

No.	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Plafon Anggaran		
		Sebelum Perubahan (Rp)	Perubahan 2017 (Rp)	Tambah/ (Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5
	13. Kecamatan Ngronggot	382.334.000	382.334.000	-
	14. Kecamatan Baron	310.536.400	310.536.400	-
	15. Kecamatan Patianrowo	472.024.000	487.024.000	15.000.000
	16 Kecamatan Lengkong	366.581.500	374.081.500	7.500.000
	17. Kecamatan Jatikalen	322.209.700	322.209.700	-
	18. Kecamatan Gondang	363.670.800	363.670.800	-
	19. Kecamatan Ngluyu	328.651.200	328.651.200	-
	20. Kecamatan Rejoso	355.041.000	355.041.000	-
	JUMLAH	904.550.289.818	1.118.052.490.111	213.502.200.293

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berangkat dari perubahan asumsi dan tantangan dari perkembangan kondisi perekonomian makro Nasional dan Provinsi Jawa Timur, dimana hal ini berimplikasi pada kondisi perekonomian di Kabupaten Nganjuk. Oleh karenanya perlu untuk melihat dan menyesuaikan asumsi makro ekonomi. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengawal pencapaian target dan tujuan pembangunan yang dimuat dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018. Pembangunan di Kabupaten Nganjuk diarahkan untuk mencapai visi **“Terwujudnya Kejayaan Nganjuk Berlandaskan Iman Dan Taqwa, Dengan Prioritas Sektor Utama Pembangunan Yang Bertumpu Pada Pengembangan Perdagangan Dan Industri Berbasis Potensi Pertanian Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Masyarakat”**

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misinya adalah sebagai berikut :

1. Terus mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan pelayanan prima dengan nuansa kehidupan yang religius.
2. Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa depan.
3. Memacu pertumbuhan ekonomi melalui pembinaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada perdagangan dan industri yang berbasis potensi pertanian.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap mengedepankan aspek pelestarian lingkungan hidup.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
6. Mengembangkan pola kehidupan dan hubungan masyarakat yang adil, berartabat, tertib dan tenteram.

Implementasi perwujudan pencapaian visi dan misi dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan kerangka pendanaan dalam APBD setiap tahunnya dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan program Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi makro yang disajikan di atas, maka pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk akan menghadapi berbagai tantangan yang meliputi:

1. *Stabilitas Ekonomi.*

Perhatian perlu diberikan pada usaha menjaga stabilitas harga komoditi pokok dan sekunder, harga komoditi baik migas maupun nonmigas serta arus modal yang dapat membahayakan perekonomian. Pokok utama adalah menjaga daya beli sebagai penggerak utama perekonomian. Stabilitas ekonomi akan makin rentan menghadapi tekanan di tengah gejolak kondisi makro ekonomi akibat kecenderungan penurunan kurs rupiah terhadap dolar dan sentiment perekonomian global.

2. *Pemerataan pertumbuhan ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi yang merata masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah. Pusat-pusat pertumbuhan yang ada saat ini diharapkan mampu memberikan efek tetesan (*trickle down effect*) bagi wilayah sekitarnya sehingga perekonomian tidak hanya terpusat pada wilayah-wilayah tertentu namun juga mampu memberikan pengaruh pada seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk.

3. *Akselerasi Program Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan.*

Pelemahan rupiah akan berdampak kepada kontraksi ekonomi yang kemudian akan bermuara pada berkurangnya daya beli masyarakat. Langkah-langkah antisipatif perlu dilakukan pada upaya-upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, dengan memperhatikan kemampuan anggaran pemerintah yang tersedia.

4. *Kapasitas Fiskal yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur penunjang.*

Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi membutuhkan porsi anggaran yang sangat besar, sementara itu kemampuan fiskal Kabupaten Nganjuk sangat terbatas sehingga ketergantungan terhadap anggaran Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup signifikan.

5. *Sektor pertanian yang menjadi sektor basis di Kabupaten Nganjuk tidak serta merta memberikan keuntungan finansial bagi pekerja sektor pertanian.*

Hal ini disebabkan masih tingginya biaya produksi yang harus ditanggung pekerja sektor pertanian yang tidak diimbangi dengan harga jual komoditas yang memadai. Sementara itu upaya peningkatan nilai tambah produksi pertanian melalui kegiatan-kegiatan perekonomian yang berupa industri pengolahan dan prosesing lanjutan komoditas pertanian masih belum optimal.

Oleh karenanya arah Kebijakan Ekonomi Makro Kabupaten Nganjuk perlu memprioritaskan penyelesaian permasalahan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat serta memerlukan penanganan mendesak dan/atau segera dari Pemerintah Kabupaten; kemudian, proyeksi kenaikan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan pembangunan yang memerlukan penyesuaian; Pencapaian target program dan kegiatan yang pelaksanaannya hingga pertengahan tahun 2017 masih memerlukan peningkatan dalam merealisasikan perkembangan kondisi sesuai kebutuhan pembangunan.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017

Kebijakan pembangunan daerah diarahkan dalam rangka mengatasi permasalahan strategis yang dihadapi dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018. Dalam pelaksanaannya kebijakan pembangunan di Kabupaten Nganjuk juga disinkronkan program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menciptakan sinergi dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan nasional yang terangkum dalam nawacita.

Prioritas pembangunan nasional dalam Nawacita diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM Indonesia baik dari segi *skill* dan *knowledge* maupun *character* sebagai salah satu modal utama menghadapi *ASEAN Economy Community* (AEC/MEA) dan meningkatkan daya saing kompetitif bidang perekonomian yang berlandaskan keunggulan komparatif sumber daya alam yang didukung sumber daya manusia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta prinsip pemerataan pembangunan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan cita-cita pembangunan Nasional dalam Nawacita, Strategi Pembangunan Nasional sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dirumuskan dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu : dimensi pembangunan manusia yang meliputi pembangunan di bidang pendidikan, mental, kesehatan dan perumahan; dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi pencapaian kedaulatan pangan, kedaulatan energi/kelistrikan, pembangunan kemaritiman dan kelautan serta pembangunan sektor pariwisata dan industri; dimensi pemerataan dan kewilayahan meliputi pemerataan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah;

Sesuai dengan prioritas dan startegi pembangunan nasional Tahun 2017, pembangunan daerah diarahkan sesuai dengan potensi dan isu strategis lokal. Kebijakan pembangunan daerah lebih ditingkatkan dan disinergikan diantaranya untuk mendukung pelaksanaan pemenuhan hak dasar sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM), pembangunan infrastruktur, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan, dengan didukung peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja pembangunan melalui kegiatan-kegiatan pembangunan sosial ekonomi yang berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai satu kesatuan dalam pembangunan nasional juga mendukung target sasaran pembangunan nasional sebagaimana dalam RPJMN 2015-2019 yang diformulasikan dalam prioritas pembangunan daerah.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 isu-isu strategis di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan urusan wajib dan urusan pilihan dan dengan memperhatikan isu strategis internasional, nasional maupun regional maka formulasi isu-isu strategis utama Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018, sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat aksesibilitas antarwilayah yang disebabkan oleh kurang representatifnya infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Masih kurang representatifnya sarana dan prasarana kesehatan yang berpengaruh pada kurangnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang kesehatan;
3. Masih kurangnya aksesibilitas dan mutu pendidikan;
4. Masih kurangnya pendapatan petani/peternak dan daya saing produk pertanian dalam arti luas;
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana konservasi sumber daya air untuk mengatasi permasalahan kelebihan dan kekurangan air baik air baku, air irigasi dan air industri;
6. Kurang memadainya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dasar permukiman serta belum terkelolanya sumber daya alam secara optimal;
7. Masih kurang optimalnya pembinaan terhadap sektor usaha kecil, menengah dan koperasi serta produk unggulan daerah;
8. Masih kurangnya investasi dan masih tingginya jumlah pengangguran terbuka;
9. Masih lebarnya kesenjangan antara pelaksanaan agama secara seremonial dengan perilaku dalam kehidupan serta semakin lunturnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan ;
10. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik;
11. Masih kurang efektifnya penanggulangan kemiskinan dalam arti luas;

12. Masih kurangnya kemampuan dan kesiapan aparaturnya dan masyarakat dalam penanganan bencana, pengurangan risiko bencana dan pemberantasan penyakit menular;
13. Belum optimalnya upaya penanggulangan kerusakan lingkungan;
14. Masih minimnya kontribusi PAD terhadap APBD.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 yang tertuang dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 diprioritaskan untuk mengatasi permasalahan serta menjawab isu-isu strategis utama yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan pelaksanaannya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Prioritas Pembangunan Tahun 2017 adalah :

1. Meningkatkan kualitas prasarana jalan dan jembatan.
Fokus prioritas pembangunan prasarana jalan dan jembatan antara lain perbaikan dan rehabilitasi/pembangunan jalan dan jembatan khususnya untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah terutama akses pada wilayah-wilayah prioritas pengembangan, kawasan ekonomi cepat tumbuh, kawasan terpencil serta jalur-jalur pergerakan barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.
2. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan bagi segenap lapisan masyarakat.
Fokus pada prioritas ini adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan termasuk rumah sakit, secara khusus adalah peningkatan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan, pelayanan kesehatan untuk keluarga miskin, kapitasi BPJS dan pengadaan mobil siaga desa.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan.
Fokus pada prioritas ini adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah melalui penyediaan: sarana dan prasarana pendidikan, mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu serta tidak diskriminatif, penyediaan : ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, buku-buku perpustakaan sekolah, penyediaan buku-buku sekolah, penyediaan biaya operasional sekolah, bantuan khusus untuk siswa dari keluarga tidak mampu, pembinaan kelembagaan sekolah dan guru-guru negeri maupun swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan/lulusan, pengembangan pendidikan inklusi, pelaksanaan pendidikan non formal dan informal, serta pendidikan masyarakat.
4. Meningkatkan pendapatan petani dan peternak serta daya saing produk pertanian dalam arti luas.

Fokus pada prioritas ini adalah mempertahankan Nganjuk sebagai daerah lumbung pangan dengan cara mempertahankan atau meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian sebagaimana target dalam RPJMD 2014-2018, Peningkatan kelembagaan petani melalui pendampingan dan pembinaan kelompok tani, pelatihan petani, peningkatan nilai tambah produksi pertanian, pengembangan agribisnis dan kemitraan, perluasan pemasaran hasil pertanian dan sebagainya.

5. Meningkatkan sarana dan prasarana konservasi sumber daya air untuk mengatasi permasalahan kelebihan dan kekurangan air baik air baku, air irigasi dan air industri.

Fokus kegiatan ini adalah pengelolaan air melalui rehabilitasi/normalisasi sarana dan prasarana pengairan, revitalisasi saluran dan sumber air/embung, memulihkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak, pemeliharaan: pintu air, waduk serta dam, perencanaan pembangunan embung-embung dan waduk baru, pembinaan petani pemakai air dsb. Salah satu upaya yang dilakukan adalah akselerasi pembangunan Bendungan Semantok terutama dalam pemenuhan kebutuhan pengadaan tanah.

6. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dasar permukiman serta pengelolaan sumber daya alam secara optimal.

Fokus pada prioritas ini adalah pembangunan dan rehabilitasi drainase dan sarana/prasarana sanitasi, pengelolaan sampah, pembangunan trotoar untuk kenyamanan pejalan kaki, normalisasi drainase, pembuatan saluran pembuang, pembuatan jalan lingkungan perumahan, peningkatan akses mendapatkan air bersih baik di perkotaan maupun di perdesaan, pengelolaan lingkungan hidup di kawasan permukiman, penanaman pohon pelindung, pembangunan taman, penyediaan sarana dan prasarana olah raga dan rekreasi.

7. Mengoptimalkan pembinaan terhadap sektor usaha kecil, menengah dan koperasi serta produk unggulan daerah.

Fokus pada prioritas ini adalah peningkatan akses permodalan pada sektor usaha kecil, pembinaan terhadap UMKM, pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan wirausaha baru, serta promosi usaha kecil, penguatan kelembagaan, permodalan serta pembinaan koperasi agar lebih berperan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat.

8. Meningkatkan investasi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus mengurangi jumlah pengangguran terbuka.

Fokus pada prioritas ini adalah promosi potensi Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan minat para investor luar negeri/luar daerah untuk menanamkan

modalnya di Kabupaten Nganjuk, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, peningkatan kualitas pelayanan perijinan, peningkatan kualitas SDM

9. Mengurangi kesenjangan antara pelaksanaan agama secara seremonial dengan perilaku dalam kehidupan serta menerapkan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan.

Fokus pada prioritas ini adalah pembinaan kerukunan dan kehidupan beragama dalam negara kesatuan Republik Indonesia, peningkatan wawasan kebangsaan dan bernegara, pentas seni budaya yang menampilkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan.

10. Mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Fokus pada prioritas ini adalah peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan berdedikasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mengikutsertakan masyarakat dalam merencanakan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, pembinaan disiplin aparatur, peningkatan etos kerja, pembinaan karier dan kompetensi, pemberian penghargaan bagi yang berprestasi, pelayanan prima kepada masyarakat.

11. Meningkatkan sinergi dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dalam arti luas.

Fokus pada prioritas ini adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan lintas sektor; pemberian bantuan sosial, beasiswa untuk anak dari keluarga miskin, kemudahan terhadap akses permodalan, pelatihan ketrampilan kerja serta penyaluran tenaga kerja, pelaksanaan transmigrasi, melaksanakan program-program pemberdayaan dsb.

12. Meningkatkan kemampuan dan kesiapan aparatur dan masyarakat dalam penanganan bencana, pengurangan risiko bencana dan pemberantasan penyakit menular.

Fokus pada prioritas ini adalah kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap bencana alam dengan kegiatan-kegiatan antara lain gladi lapang kebencanaan, penguatan kapasitas relawan, sosialisasi pencegahan dan resiko bencana, penyiapan personil dan logistik untuk tanggap bencana, serta rehabilitasi tanggap bencana.

13. Meningkatkan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan.

Fokus pada prioritas ini adalah pemulihan kerusakan lingkungan hidup, pengembangan ruang terbuka hijau tepi jalan, peningkatan konservasi daerah tangkapan air, pendidikan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan.

14. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Fokus pada prioritas ini adalah upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan tata kelola administrasi keuangan yang sesuai dengan SAP dengan dukungan kegiatan-kegiatan antara lain: intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pemutakhiran data potensi pajak bumi dan bangunan, peningkatan layanan terhadap sumber-sumber pendapatan retribusi daerah seperti pasar sebagai upaya untuk meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD serta peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya untuk mewujudkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel.

15. Pengawasan dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih

Fokus pada prioritas ini adalah pada transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan kegiatan-kegiatan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, serta Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sebagai upaya mendukung pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah.

16. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa

Prioritas ini adalah bentuk upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa terkait implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Fokus pada prioritas ini adalah Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, dan Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa

BAB V

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN NGANJUK

Rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan RKPD Tahun 2017 Kabupaten Nganjuk, yang berisi program dan kegiatan lanjutan tahun 2017, program dan kegiatan yang dihapus tahun 2017, program dan kegiatan yang baru tahun 2017, program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) Tahun 2017.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2017 yang memuat di antaranya: 1) perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya; 2) program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2017 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan 3) capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk 2017 telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 meliputi penambahan kegiatan baru yang belum tertampung dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2017.

Pada Matrik berikut ini adalah perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 berdasar OPD.

Tabel V.1

**RINCIAN PLAFON ANGGARAN KEGIATAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)	LOKASI	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1.	DINAS PENDIDIKAN DAERAH			110.428.950.000		
A	Program Pendidikan Anak Usia Dini					
1	Rehab Gedung dan Pemavingan TK Negeri Pembina Nangskatan Rejoso	Terlaksananya rehab gedung dan pemavingan TK Negeri Pembina Nangskatan Rejoso sebanyak 1 paket	1 Paket	200.000.000	Kab. Nganjuk	Kegiatan baru
2	Pendidikan Karakter, Budi Pekerti dan Bela Negara bagi Pendidik PAUD	Terlaksananya pendidikan karakter, budi pekerti dan bela negara bagi pendidik PAUD sebanyak 400 orang	400 Orang	428.850.000	Kab. Nganjuk	Kegiatan baru
B	Program pengelolaan dana BOS					
1	Pengelolaan Dana BOS SD	Terkelolanya Dana BOS SD	100%	66.913.280.000	Kab. Nganjuk	
2	Pengelolaan Dana BOS SMP	Terkelolanya Dana BOS SMP	100%	34.749.000.000	Kab. Nganjuk	
C	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					
1	Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kauman 1 Nganjuk	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SDN Kauman 1 Nganjuk sebanyak 3 unit	3 Unit	200.000.000	Kab. Nganjuk	Kegiatan baru
2	Pengadaan Peralatan/Media Pendidikan SMPN (DAK Reguler 2017)	Terlaksananya pengadaan peralatan pendidikan SMPN (DAK Reguler 2017)	29 Paket	3.045.685.000	Kab. Nganjuk	Sinkronisasi bantuan pemerintah Tahun Anggaran 2017
3	Pengadaan Kain Siswa Baru	Terlaksananya pengadaan kain siswa baru SD Negeri 15.446 siswa dan SMP Negeri 10.794 siswa	15.446 siswa SD Negeri, 10.794 siswa SMP Negeri	2.687.685.000	Kab. Nganjuk	Kegiatan baru
4	BOP MADIN (BK Prov 2017)	Terlaksananya BOP Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Dimiyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	100%	100.000.000	Kab. Nganjuk	BK Prov
5	Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi (BK Prov 2017)	Terlaksananya pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI) Tingkat Provinsi	75%	10.000.000	Kab. Nganjuk	BK Prov
6	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 3 Ngronggot	Terwujudnya pembangunan ruang kelas baru SMPN 3 Ngronggot	1 Ruang Kelas	108.950.000	Kec. Ngronggot	Kegiatan baru
7	Pavingisasi SDN Cengkok 3 Ngronggot	Terwujudnya pavingisasi cengkok 3 Ngronggot	1250 m2	150.000.000	Kec. Ngronggot	Kegiatan baru
8	Pengadaan Mebelair SMPN 3 Ngronggot	Terwujudnya pengadaan mebelair SMPN 3 Ngronggot	1 Paket	100.000.000	Kec. Ngronggot	Kegiatan baru

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
D	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan						
1	Bantuan Tambahan Kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Terlaksananya bantuan tambahan kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 3.091 orang	3.091 Orang	1.545.500.000	Kab. Nganjuk	Kegiatan baru	
2	Tuan Rumah Pelaksanaan Hari Guru (BK Prov 2017)	Terlaksananya tuan rumah pelaksanaan hari guru	100%	150.000.000	Kab. Nganjuk	BK Prov	
3	Seleksi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi (BK Prov 2017)	Terlaksananya seleksi dan pembinaan guru dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi sebanyak 200 orang	100%	20.000.000	Kab. Nganjuk	BK Prov	
4	Seleksi Kepala Sekolah Berwawasan Lingkungan (BK PROV 2016)	Terlaksananya seleksi kepala sekolah berwawasan lingkungan (BK PROV 2016)	150 Orang	20.000.000	Kab. Nganjuk	Silpa BK Prov 2016	
2.	DINAS KESEHATAN DAERAH			56.766.807.200			
A	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN						
1	Distribusi Obat dan BMHP serta Dukungan Manajemen Sistem E-Logistik	Terlaksananya Distribusi Obat dan BMHP serta Dukungan Manajemen Sistem E-Logistik		72.219.000		Kegiatan baru sesuai perpres 97 Tahun 2016, dan sudah diusulikan dalam perubahan penjabaran APBD	
B	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT						
1	Pengembangan Taman Posyandu (BK 2017)	Terlaksananya kegiatan pendampingan taman posyandu, magang kader, rakor linsek/linprog Taman Posyandu Tingkat Kab. Dan Kecamatan dan Monev Taman Posyandu	100%	55.000.000	Kecamatan dan Kabupaten	Bantuan Keuangan 2017	
2	Pengembangan Taman Posyandu (Silpa BK 2016)	Terlaksananya kegiatan pendampingan taman posyandu, magang kader, rakor linsek/linprog Taman Posyandu Tingkat Kab. Dan Kecamatan dan Monev Taman Posyandu	100%	38.888.200	Kecamatan dan Kabupaten	Silpa BK 2016	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
			4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
C	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya						
1	Pengadaan Mobil Siaga Desa Kabupaten Nganjuk	Terlaksananya mobil siaga sebanyak 284 unit	284 unit	56.210.700.000	284 desa/ke	Kegiatan baru	
2	Pengadaan Alat Kesehatan	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan		200.000.000	Polindes warujayeng-tanjunganom; Ngrotomargopatut	Kegiatan baru	
3	Rehabilitasi Polindes	Terlaksananya rehabilitasi Polindes Sembung		190.000.000	Polindes Sembung-Margopatut	Kegiatan baru	
3	RSUD KERTOSONO			1.084.273.093			
A	Program Pembinaan Lingkungan Sosial						
1	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya (DBHCHT)	Terwujudnya alat kesehatan dan alat kedokteran sesuai standart	100%	1.084.273.093	RSUD Kertosono	Silpa DBHCHT 2016	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			29.969.500.000			
A	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan mobil laboratorium dan pemeliharaan jalan/jembatan	1 unit roda 4 dan 6 unit roda 2	350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk		
B	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan						
1	Rehab jalan mojuduwur - suru	Terlaksananya rehab jalan		200.000.000			
2	Rekonstruksi jalan Kacangan-Plagri-Pengkol (Kacangan) (DBHCHT)	Terlaksananya Rekonstruksi jalan	P=600 m.; L= 4 m.	600.000.000,00	Kec. Berbek	Perubahan Sumber Dana	
3	Pelebaran jalan Gondang Kulon-Ngluyu (DBHCHT)	Terlaksananya Pelebaran jalan	P=750 m L=5 m	1.500.000.000,00	Kec. Ngluyu	Perubahan Sumber Dana	
4	Peningkatan jalan Gampeng-Lengkong Lor (DBHCHT)	Terlaksananya Peningkatan jalan	P=1000 m ; L= 3,5 m	1.350.000.000,00	Kec. Ngluyu	Perubahan Sumber Dana	
5	Peningkatan jalan Kramat-Tanjungrejo (DBHCHT)	Terlaksananya Peningkatan jalan	P=500 m ; L= 3,50 m	750.000.000,00	Kec. Nganjuk dan Kec. Loceret	Perubahan Sumber Dana	
6	Pembangunan jalan Margopatut - Kepel	Terlaksananya pembangunan jalan	Pj. 500,00 m; Lb. 3,00 m	199.000.000,00	Kec. Ngetos	Perubahan Sumber Dana	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)	LOKASI	KET.
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
7	Pembangunan jalan Jatitanggal - Dlopo	Terlaksananya pembangunan jalan	Pj. 500,00 m; Lb. 2,50 - 3,00 m	197.000.000,00	Kec. Ngetos	
8	Pembangunan jalan Awar awar - Bandungan	Terlaksananya pembangunan jalan	Pj. 425,00 m; Lb. 3,00 m	198.000.000,00	Kec. Wilangan	
9	Review DED Jembatan Pogoh	Terlaksananya Review DED Jembatan Pogoh	1 Dokumen	45.000.000,00	Kec. Loceret	
10	DED Pelebaran Jembatan Putukrejo	Telaksananya DED Pelebaran Jembatan Putukrejo	1 Dokumen	50.000.000,00	Kec. Loceret	
11	DED Pembangunan Jembatan Juwono	Terlaksananya DED Pembangunan Jembatan Juwono	1 Dokumen	50.000.000,00	Kec. Kertosono	
12	DED Pembangunan Jembatan Jaan	Terlaksananya DED Pembangunan Jembatan Jaan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kec. Gondang	
13	DED Pembangunan Jembatan Pengkol	Terlaksananya DED Pembangunan Jembatan Pengkol	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Nganjuk	
14	DED Pelebaran Jalan Mangunsari - Bajulan	Terlaksananya DED Pelebaran Jalan Mangunsari - Bajulan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Nganjuk	
15	DED Pelebaran Jalan Banjarsari - Kurungrejo	Terlaksananya DED Pelebaran Jalan Banjarsari - Kurungrejo	1 Dokumen	50.000.000,00	Kec. Ngronggot	
16	DED Pelebaran Jalan Baron - Gareman	Terlaksananya DED Pelebaran Jalan Baron - Gareman	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Nganjuk	
17	DED Pelebaran Jalan Banarankulon - Ngudikan	Terlaksananya DED Pelebaran Jalan Banarankulon - Ngudikan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Nganjuk	
18	DED pelebaran jembatan Ngujung	Terlaksananya DED jembatan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kec. Gondang	
19	DED Pembangunan Jembatan Magangan	Terlaksananya DED jembatan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Nganjuk	
20	DED Peningkatan Jalan Kecubung - Pacekulon	Terlaksananya DED Jalan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kec. Pace	
21	Pembangunan Jalan Tembus Losari-Lengkonglor (TMMD Imbangan)	Terlaksananya pembangunan jalan		500.000.000,00	Kec. Lengkong	
22	DED Pembangunan Jembatan Keduk Ds. Margopatut	Terlaksananya DED jembatan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kec. Sawahan	
23	DED Pembangunan Jembatan Jamusan Sonopatik	Terlaksananya DED jembatan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kec. Berbek	
24	DED Pembangunan Jembatan pada ruas Jl. Ngangkatan - Musirlor	Terlaksananya DED jembatan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kec. Rejoso	
25	DED Pelebaran Jembatan Jurangringin dan Opritran ruas Jalan Ngetos - Pogoh	Terlaksananya DED jembatan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kec. Ngetos	
26	DED Pembangunan Jembatan Sumberklampok	Terlaksananya DED jembatan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kec. Loceret	
27	Pembangunan Jalan Mojoagung - Singkalanyar	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Pj. 500,00 m; Lb. 3,00 m	199.000.000,00	Kec. Prambon	
28	Pembangunan Jalan Sobontoro - Watudandang - Sugihwaras	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Pj. 500,00 m; Lb. 3,00 m	196.000.000,00	Kec. Prambon	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
29	Rekonstruksi Jalan Kepel - Sumbertumpeng (Margopatut)	Terlaksananya rekonstruksi jalan Kepel - Sumbertumpeng (Margopatut)	100%	198.000.000,00	Kec. Ngetos dan Kec. Sawahan		
30	Rekonstruksi Jalan bulak - Sembung - Kepel	Terlaksananya rekonstruksi Jalan bulak - Sembung - Kepel	100%	197.000.000,00	Kec. Ngetos		
31	DED Rekonstruksi jembatan Blitaran	Terlaksananya DED jembatan	1 Dokumen	300.000.000,00	Kec. Sukomoro		
32	DED Rekonstruksi Jembatan Sendangbumen	Terlaksananya DED jembatan	1 Dokumen	110.000.000,00	Kec. Berbek		
33	DED jembatan klurahan kec ngronggot	Terlaksananya DED jembatan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kec Ngronggot		
34	Pembangunan jalan tembus Desa Trayang ke Desa Dadapan	Terlaksananya pembangunan jalan P= 300 m. x 3 m.	1 paket	200.000.000,00	Kec. Ngronggot		
35	Pengaspalan jalan Desa Sonopatik - Desa Sumberurip	Terlaksananya pembangunan jalan P= 300 m. x 3 m.	1 paket	200.000.000,00	Kec. Berbek		
36	Rekonstruksi Jalan poros desa Bukur	Terlaksananya pembangunan jalan P= 300 m. x 3 m.	1 paket	200.000.000,00	Kec. Patianrowo		
37	Rekonstruksi Jalan Bulak - Kepel	Terlaksananya pembangunan jalan P= 300 m. x 3 m.	100%	198.000.000,00	Kec. Sawahan		
38	Rekonstruksi Jalan Tosari - Margopatut	Terlaksananya pembangunan jalan P= 300 m. x 3 m.	100%	199.000.000,00	Kec. Sawahan		
39	Rekonstruksi Jalan Siwalan - Sawahan	Terlaksananya pembangunan jalan P= 300 m. x 3 m.	100%	197.000.000,00	Kec. Sawahan		
40	Peningkatan jalan menuju SMAN I Ngronggot (PIK)	Terlaksananya Pembangunan Jalan P = 300 x 3 m	100%	196.000.000,00	Kec. Ngronggot		
41	Pembangunan jalan dari tanah menjadi makadam Bandaralim - Jambi (PIK)	Terlaksananya Pembangunan jalan P = 600 x 3 m	100%	195.000.000,00	Kec. Baron		
42	Peningkatan jalan Kalianyar - Tanjung (PIK)	Terlaksananya Pembangunan Jalan P= 250 m ; L= 3 m	100%	198.000.000,00	Kec. Kertosono		
43	Rekonstruksi Jalan Ds. Blitaran - Ds. Sumengko (PIK)	Terlaksananya Pembangunan Jalan P = 200 x 3 m	100%	199.000.000,00	Kec. Sukomoro		
44	Peningkatan jalan dari tanah menjadi makadam Ds. Sonobekel (PIK)	Terlaksananya pembangunan jalan P = 300 m. x 3 m.	100%	197.000.000,00	Kec. Tanjunganom		
45	Rekonstruksi Jalan Banjaranyar - Blitaran Sukomoro (PIK)	Terlaksananya pembangunan jalan P = 1000 m. x 3 m.	100%	195.000.000,00	Kec. Tanjunganom		
46	Rekonstruksi Jalan Kedungrejo - Demangan (PIK)	Terlaksananya pembangunan jalan P= 550 m. x 3 m.	100%	198.000.000,00	Kec. Tanjunganom		
47	Rekonstruksi Jalan Nginggo - Pandean	Terlaksananya pembangunan jalan P= 500 m. x 3 m.	100%	197.000.000,00	Kec. Gondang		
48	Rekonstruksi Jalan Ketawang - Jaan	Terlaksananya pembangunan jalan P= 300 m. x 3 m.	100%	199.000.000,00	Kec. Gondang		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
49	DED Pembangunan Jembatan Ngangkatan III	Terlaksananya DED jembatan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kec. Rejoso		
50	DED Pembangunan Jembatan Gejagan	Terlaksananya DED jembatan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kec. Loceret		
51	Peningkatan Jalan Selopuro - Dlopo	Terlaksananya Peningkatan Jalan P = 300 m L = 3 m	100%	200.000.000,00	Kec. Ngetos		
52	DED Pembangunan Jembatan Balonggebang	Terlaksananya DED jembatan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kec. Gondang		
53	DED Pembangunan Jembatan Prayungan	Terlaksananya DED jembatan	1 Dokumen	50.000.000,00	Kec. Lengkon		
C	Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong gorong						
1	Pembangunan drainase jalan poros Dsn. Gimbal-Ds. Ngliman (Sawah) (DBHCHT)	Terlaksananya Pembangunan drainase	P=250 m, L = 0,60m, T = 0,75 m	200.000.000	Kec. Sawahan	Perubahan Sumber Dana	
2	Pembangunan drainase jalan poros Ds. Ngadipiro Wilangan (DBHCHT)	Terlaksananya Pembangunan drainase	P=300 m; L = 0,75 m	200.000.000	Kec. Wilangan	Perubahan Sumber Dana	
3	Pembangunan Gorong gorong Jl. Moh. Yamin	Terlaksananya pembangunan gorong2	Pj. 0,50 m; Lb. 8,00 m ; T : 0,50 m	150.000.000	Kec. Nganjuk		
4	Pembangunan Gorong Gorong Ruas Gondang kulon - Ngluyu	Terlaksananya pembangunan gorong2	Pj. 2,00 m; Lb. 8,00 m ; T : 2,00 m	180.000.000	Kec. Ngluyu		
5	Pembangunan gorong-gorong di Jl. Lurah Surodarmo	Terlaksananya pembangunan gorong2	Pj. 1,00 m; Lb. 8,00 m ; T : 1,00 m	198.000.000	Kec. Nganjuk		
6	Pembangunan gorong-gorong di Jl. S. Parman	Terlaksananya pembangunan gorong2	Pj. 1,00 m; Lb. 8,00 m ; T : 1,00 m	197.000.000	Kec. Nganjuk		
7	Pembangunan gorong-gorong Jalan poros Desa Klodan	Terlaksananya pembangunan gorong2	Pj. 5,00 m; Lb. 1,50 m ; T : 1,50 m	200.000.000	Kec. Ngetos		
8	Pembangunan Gorong-gorong Glidah	Terlaksananya pembangunan gorong2	Pj. 4,00 m; Lb. 1,50 m ; T : 3,00 m	200.000.000	Kec. Ngluyu		
9	Pembangunan Gorong-gorong Lemah Bledu	Terlaksananya pembangunan gorong2	Pj. 6,00 m; Lb. 2,00 m ; T : 2,00 m	200.000.000	Kec. Gondang		
D	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong						
1	Pembangunan tembok penahan jalan Ngetos-Suru (Ngetos) (DBHCHT)	Terlaksananya Pembangunan tembok penahan jalan	P=50 m. ; T= 2 m.	150.000.000	Kec. Ngetos	Perubahan Sumber Dana	
2	Pembangunan pengaman badan jalan Sanggrahan-Baleturi (lanjutan)	Terlaksananya pembangunan pengaman badan jalan	P=170 m. ; T= 1 m.	200.000.000	Kec. Prambon		
3	Pembangunan pengaman badan jalan Mojoagung-Singkalanyar	Terlaksananya pembangunan pengaman badan jalan	P=170 m. ; T= 1 m.	200.000.000	Kec. Prambon		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
4	Pembangunan pengaman badan jalan Watudandang-Sugihwaras	Terlaksananya pembangunan pengaman badan jalan	P=170 m. ; T= 1 m.	200.000.000	Kec. Prambon		
5	Pembangunan Pengaman Badan Jalan Poros Desa Grojogan	Terlaksananya pembangunan pengaman badan jalan	P=100 m. ; T= 2 m.	200.000.000	Kec. Berbek		
6	Pembangunan Pengaman Badan Jalan Poros Desa sumberurip	Terlaksananya pembangunan pengaman badan jalan	P=100 m. ; T= 2 m.	200.000.000	Kec. Berbek		
7	Pembangunan Pengaman Badan Jalan Poros Ds Sendangbumen	Terlaksananya pembangunan pengaman badan jalan	P=125 m. ; T= 1,5 m.	200.000.000	Kec. Berbek		
8	Pembangunan Pengaman Badan Jalan Poros Ds Bungur	Terlaksananya pembangunan pengaman badan jalan	P=170 m. ; T= 1 m.	200.000.000	Kec. Sukomoro		
9	Pembangunan Pengaman Badan Jalan Raya Desa Ngasem - Perning	Terlaksananya pembangunan TPT P = 100 m. x 2 m.	100%	200.000.000	Kec. Jatikalen		
10	Pembangunan Pengaman Badan Jalan Kuniran Ds. Ngluyu	Terlaksananya pembangunan pengaman badan jalan	P = 5 m. x T = 5 m.	200.000.000	Kec. Ngluyu		
E	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan						
1	Pemeliharaan berkala jalan Candirejo-Sambijajar (Loceret) (DBHCHT)	Terlaksananya pemeliharaan jalan	Pj. 870 m; Lb. 3,00 m	650.000.000	Kec. Loceret		Perubahan Sumber Dana
2	Rehab jalan Kuncir-Kepel (Ngetos) (DBHCHT)	Terlaksananya pemeliharaan jalan	Pj. 700 m; Lb. 3,00 - 3,50 m	700.000.000	Kec. Ngetos		Perubahan Sumber Dana
3	Pemeliharaan berkala jalan Cerme-Berbek (DBHCHT)	Terlaksananya pemeliharaan jalan	Pj. 1000 m; Lb. 6,00 m	1.000.000.000	Kec. Pace		Perubahan Sumber Dana
4	Pemeliharaan berkala jalan Bandung-Mojokendil (DBHCHT)	Terlaksananya pemeliharaan jalan	Pj. 1000 m; Lb. 3,50 m	1.000.000.000	Kec. Ngronggot		Perubahan Sumber Dana
5	Pemeliharaan berkala berm/bahu jalan	Terlaksananya Pemeliharaan berkala berm/bahu jalan	100%	150.000.000	Kab. Nganjuk		
6	DED Pemeliharaan berkala Jalan Tanggungan-Mungkung	Terlaksananya DED	1 Dokumen	50.000.000	Kec. Berbek		
7	DED Pemeliharaan berkala Jalan Ngrajak-Ngujung	Terlaksananya DED	1 Dokumen	150.000.000	Kec. Gondang dan Tanjunganom		
8	Pemeliharaan jalan Desa Sudimoroharjo-Mbedrek	Terlaksananya pemeliharaan jalan P = 300 m L = 3 m	100%	200.000.000	Kec. Wilangan		
9	Pemeliharaan jalan Desa Godean ke Desa Jatirejo Loceret	Terlaksananya pemeliharaan jalan P = 300 m L = 3 m	100%	200.000.000	Kec. Loceret		
10	Pemeliharaan jalan dari Desa Ngadiboyo menuju desa Tempuran Banaran kulon Desa Sukoharjo	Terlaksananya pemeliharaan jalan P = 300 m L = 3 m	100%	200.000.000	Kec. Rejoso dan Wilangan		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
			4	5	6		
11	Pemeliharaan Jalan Ngliman - Ganter	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 500 m L = 3 m	100%	197.000.000	Kec. Sawahan		
12	Pemeliharaan Jalan Garu - Sumurpandan	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 400 m L = 3 m	100%	200.000.000	Kec. Baron		
13	Pemeliharaan Jalan Dlopo - Kepel	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 300 m L = 3 m	100%	200.000.000	Kec. Ngetos		
14	Pemeliharaan Jalan Pesudukuh - Pesulor	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 400 m L = 3 m	100%	196.000.000	Kec. Bagor		
15	Pemeliharaan Jalan Dsn. Banar - Ds. Sambikenceng	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 300 m L = 3 m	100%	198.000.000	Kec. Baron		
16	Pemeliharaan Jalan Dsn. Jeruklor Ds. Mabung	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 300 m L = 3 m	100%	197.000.000	Kec. Baron		
17	Pemeliharaan Jalan Dsn. Karangsono Ds. Banar - Kantor Desa Katerban	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 300 m L = 3 m	100%	196.000.000	Kec. Baron		
18	Pemeliharaan Jalan Poros Desa Senjayan - Kedungglugu	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 500 m L = 3,00 m	100%	198.000.000	Kec. Gondang		
19	Pemeliharaan Jalan Dsn. Logawe (lokasi transmigrasi Aceh)	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 300 m L = 3 m	100%	197.000.000	Kec. Kertosono		
20	Pemeliharaan Jalan Poros Ds. Kecubung	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 300 m L = 3 m	100%	198.000.000	Kec. Pace		
21	Pemeliharaan Jalan Poros Desa Getas - Ds. Sonobekel	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 300 m L = 3 m	100%	197.000.000	Kec. Tanjunganom		
22	Pemeliharaan Jalan Petak - Ngudikan	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 400 m L = 3 m	100%	196.000.000	Kec. Bagor		
23	Pemeliharaan Jalan Ronggo Warsito	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 350 m L = 3 m	100%	197.000.000	Kec. Kertosono		
24	Pemeliharaan Jalan Sonobekel - Sekarputih	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 400 m L = 3 m	100%	197.500.000	Kec. Tanjunganom		
25	Pemeliharaan Jalan Urip Sumoharjo Kertosono	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 400 m L = 3 m	100%	200.000.000	Kec. Kertosono		
26	Pemeliharaan Jalan Letjen Panjaitan Kertosono	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 400 m L = 3 m	100%	197.000.000	Kec. Kertosono		
27	Pemeliharaan Jalan Cipto Mangun Kusumo dan Jalan Dewi Sartika Kertosono	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 350 m L = 3 m, P = 200 m L = 3 m	100%	198.000.000	Kec. Kertosono		
28	Pemeliharaan Jalan Pacekulon - Sanan	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 400 m L = 3 m	100%	198.000.000	Kec. Pace		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
29	Pemeliharaan Jalan Kelutan - Jabon	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 500 m L = 3 m	100%	197.000.000	Kec. Ngronggot		
30	Pemeliharaan Jembatan Ngangkatan pada ruas jalan Musirlor - Ngangkatan	Terlaksananya Pemeliharaan Jembatan P = 12 m L = 3 m	100%	200.000.000	Kec. Rejoso		
31	Pemeliharaan Jalan Wachid Hasyim dan Koprul Harun	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 300 m L = 3 m	100%	200.000.000	Kec. Kertosono		
32	Pemeliharaan Jalan Lingkar Pasar Tanjunganom	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 300 m L = 3 m	100%	200.000.000	Kec. Tanjunganom		
33	Pemeliharaan jalan Tirtobinangun - Ngrombot	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 300 m L = 3 m	100%	200.000.000	Kec. Patianrowo		
34	Pemeliharaan jalan Nglundo - Blitaran	Terlaksananya Pemeliharaan Jalan P = 300 m L = 3 m	100%	195.000.000	Kec. Sukomoro		
F	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan						
1	Penyusunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Terlaksananya Penyusunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	1 dokumen	40.000.000	Kab. Nganjuk		
G	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya						
1	Normalisasi Sal. Sek. Milir BML.6	Terwujudnya galian waled	2000 m	150.000.000,00	Ds. Sekaran Kec. Loceret		
2	Rehabilitasi Sal. Sek. Besuk	Terwujudnya lining pasangan	500 m	195.000.000,00	Ds. Kutorejo, Banaran, Pelem Kec. Kertosono		
3	Rehabilitasi Sal. Sek. Banaran BBN.5	Terwujudnya lining pasangan	150 m	196.000.000,00	Ds. Gemenggeng Kec. Pace		
4	Normalisasi Sal. Sekunder Kedungsoko	Terwujudnya galian waled	2000 m	150.000.000,00	Ds. Sumengko Kec. Sukomoro		
5	DED Peningkatan Saluran Sekunder Ketandan	Terlaksananya DED	1 Dokumen	20.000.000,00	Lengkong		
6	DED Peningkatan Saluran Sekunder Sumberkepuh	Terlaksananya DED	1 Dokumen	20.000.000,00	Lengkong		
7	DED Peningkatan Saluran Sekunder Pengkol	Terlaksananya DED	1 Dokumen	20.000.000,00	Patianrowo		
8	DED Peningkatan Syphon & Saluran Sekunder Kedungsoko	Terlaksananya DED	1 Dokumen	20.000.000,00	Sukomoro		
9	DED Peningkatan Saluran Sekunder Banaran Kiri	Terlaksananya DED	1 Dokumen	20.000.000,00	Pace		
10	DED Peningkatan Saluran Sekunder Purwo	Terlaksananya DED	1 Dokumen	20.000.000,00	Loceret		
11	DED Peningkatan Saluran Sekunder Gilis II	Terlaksananya DED	1 Dokumen	20.000.000,00	Loceret		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
12	DED Peningkatan Saluran Sekunder Girirejo	Terlaksananya DED	1 Dokumen	20.000.000,00	Bagor		
13	DED Peningkatan Saluran Sekunder Kramat	Terlaksananya DED	1 Dokumen	20.000.000,00	Loceret		
14	DED Peningkatan Saluran Pembuang Maguan	Terlaksananya DED	1 Dokumen	20.000.000,00	Berbek		
15	DED Peningkatan Saluran Sekunder Kobong I	Terlaksananya DED	1 Dokumen	15.000.000,00	Sawahan		
16	DED Peningkatan Dam dan Saluran Sekunder Tretes	Terlaksananya DED	1 Dokumen	20.000.000,00	Gondang		
17	DED Peningkatan Saluran Sekunder Argomulyo	Terlaksananya DED	1 Dokumen	20.000.000,00	Ngluyu		
18	Rehabilitasi Saluran sekunder Tunglur Dusun Tampang	Terlaksananya Rehabilitasi Saluran sekunder Tunglur Dusun Tampang	200 m	196.000.000,00	Ds. Wilangan Kec. Wilangan		
19	Rehab Bagunan Bagi BML.5 Sal. Sek. Mililir	Terwujudnya pemasangan lantai dan lining	50 m	180.000.000,00	Ds. Patihan Kec. Loceret		
20	Pemeliharaan Sal. Sek. Karangtengah BK.A.1 Kiri	Terwujudnya pemasangan lantai dan lining	150 m	185.000.000,00	Ds. Kutorejo Kec. Bagor		
21	Rehabilitasi Sal. Sek. B. 21 a.138 KW. 127	Terwujudnya lining pemasangan	250 m	200.000.000,00	Ds. Kemaduh Kec. Baron		
22	Rehab Sal. Sek. B.24 ai. 154 KW. 138	Terwujudnya lining pemasangan	200 m	190.000.000,00	Ds. Jekek Kec. Baron		
G	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, Bendungan dan Sumber Daya Air Lainnya						
1	DED Peningkatan Dam Tiripan	Terlaksananya DED	1 Dokumen	20.000.000,00	Berbek		
2	DED Peningkatan Dam Pandansili II	Terlaksananya DED	1 Dokumen	20.000.000,00	Ngetos		
3	DED Peningkatan Dam Klonggean II	Terlaksananya DED	1 Dokumen	20.000.000,00	Berbek		
4	Pemeliharaan Dam Kedung Poh	Terlaksananya Perbaikan DAM	1 unit	200.000.000,00	Ds. Sudimoroharjo Kec. Wilangan		
H	Program Pengendalian Banjir						
1	Rehabilitasi Sal. Sekunder Sumbersono BSS.1	Terwujudnya Talud pemasangan	300 m	195.000.000,00	Ds. Prayungan Kec. Lengkong		
2	Rehabilitasi Sayap Hulu Dam Tirip	Terwujudnya Talud pemasangan	150 m	196.000.000,00	Ds. Sumberurip Kec. Berbek		
3	Rehabilitasi Sal. Pemb. Ganggangmalang	Terwujudnya Talud pemasangan	100 m	195.000.000,00	Ds. Sumengko Kec. Sukomoro		
4	Normalisasi Kali Kedung Pedet	Terlaksananya Normalisasi Kali Kedung Pedet	1500 m	198.000.000,00	Kel. Cangkringan Kec. Nganjuk		
5	Rehabilitasi Kali Widas (Makam Syekh Sulqi)	Terlaksananya Rehabilitasi Kali Widas (Makam Syekh Sulqi)	20 m	198.000.000,00	Ds. Wilangan Kec. Wilangan		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
6	Rehabilitasi Sal. Pemb. Bodor	Terlaksananya Rehabilitasi Kali Widas (Makam Syekh Sulqi)	300 m	195.000.000,00	Ds. Bodor Kec. Pace		
I	Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum						
1	Pembangunan plensengan dan pengurangan Rest Area Monumen Marsinah	Terbangunnya plensengan rest area dan pengurangan rest area Monumen Marsinah	1 paket	1.200.000.000	Kec.Sukomoro		
J	Program Rehabilitasi, Revitalisasi dan Refungsionalisasi Bangunan dan Gedung Pemerintah						
1	DED Renovasi Masjid Baitussalam Nganjuk	Tersusunanya DED Renovasi Masjid Baitussalam	1 Dokumen	150.000.000	Kab. Nganjuk		
2	DED Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Ploso	Tersusunanya DED Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Ploso	1 Dokumen	50.000.000	Kab. Nganjuk		
3	Amdal Gedung Perkantoran Pemerintah Kabupaten	Tersusunanya Amdal Gedung Perkantoran Pemerintah Kabupaten	1 Dokumen	250.000.000	Kec. Nganjuk		
4	Andal Lalin Gedung Perkantoran Pemerintah Kabupaten	Tersusunanya Andal Lalin Gedung Perkantoran Pemerintah Kabupaten	1 Dokumen	100.000.000	Kec. Nganjuk		
5	Penataan halaman dan lingkungan Kantor Jalan Dermojoyo	Pemavingan, tempat parkir dan taman Lingkungan Kantor Jalan Dermojoyo	1 paket	199.000.000	Kec. Nganjuk		
6	DED Penataan Kawasan Kantor Kecamatan Bagor	Tersusunanya DED	1 Dokumen	50.000.000	Kec. Bagor		
7	DED Pembangunan dan perluasan gedung puskesmas Kecamatan Bagor	Tersusunanya DED	1 Dokumen	90.000.000	Kec. Bagor		
8	Penataan Halaman Gedung Wanita	Terlaksananya Penataan Halaman Gedung Wanita	1 paket	195.000.000	Kec. Nganjuk		
9	Pembangunan kanopi Kantor Kesbangpolinmas	Terlaksananya Pembangunan kanopi Kantor Kesbangpolinmas	1 paket	80.000.000	Kab. Nganjuk		
K	Program Perencanaan Tata Ruang						
1	KLHS RDTR Perkotaan Kertosono	Tersusunnya KLHS RDTR Perkotaan Kertosono	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Nganjuk		
2	KLHS RDTR Perkotaan Nganjuk	Tersusunnya KLHS RDTR Perkotaan Nganjuk	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Nganjuk		
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			3.600.000.000			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
			4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
A	Program Lingkungan Sehat Permukiman						
1	Pembangunan paving jalan marsinah	Terlaksananya Pembangunan paving jalan marsinah	100%	200.000.000,00	Ds. Nglundo		
2	Pembangunan Drainase desa Bagorkulon	Terlaksananya Pembangunan Drainase desa Bagorkulon	1 Paket	150.000.000,00	Kec. Bagor		
3	Rehab Drainase desa Sukoharjo-Thokdadap	Terlaksananya Rehab Drainase desa Sukoharjo-Thokdadap	1 Paket	150.000.000,00	Kec. Wilangan		
4	Pembangunan Drainase desa Banaran	Terlaksananya Pembangunan Drainase desa Banaran	1 Paket	150.000.000,00	Kec. Bagor		
5	Pavingisasi jalan desa Candirejo-Gejagan	Terlaksananya Pavingisasi jalan desa Candirejo-Gejagan	1 Paket	150.000.000,00	Kec. Loceret		
6	Jalan Lingkungan dusun Banar ds. Katerban	Terlaksananya Jalan Lingkungan dusun Banar ds. Katerban	1 Paket	150.000.000,00	Kec. Baron		
7	Penataan Drainase desa Gondangkulon (Sebelah pasar Gondang)	Terlaksananya Penataan Drainase desa Gondangkulon (Sebelah pasar Gondang)	1 Paket	200.000.000,00	Kec. Gondang		
8	Penataan Drainase Jalan poros desa Begendeng	Terlaksananya Penataan Drainase Jalan poros desa Begendeng	1 Paket	200.000.000,00	Kec. Jaticalen		
9	Pemb. Paving jalan tembus Termasuk babadan Patianrowo ke Bukur	Terlaksananya Pemb. Paving jalan tembus Termasuk babadan Patianrowo ke Bukur	1 Paket	150.000.000,00	Kec. Patianrowo		
10	Penataan Drainase jalan poros desa Bukur	Terlaksananya Penataan Drainase jalan poros desa Bukur	1 Paket	200.000.000,00	Kec. Patianrowo		
11	Penataan Drainase Kandeg desa Waung	Terlaksananya Penataan Drainase Kandeg desa Waung	1 Paket	150.000.000,00	Kec. Baron		
12	Pembangunan Drainase desa Wilangan	Terlaksananya Pembangunan Drainase desa Wilangan	1 Paket	150.000.000,00	Kec. Wilangan		
13	Pembangunan Drainase desa Banaranwetan	Terlaksananya Pembangunan Drainase desa Banaranwetan	1 Paket	150.000.000,00	Kec. Wilangan		
14	Pembangunan Drainase desa Sukoharjo	Terlaksananya Pembangunan Drainase desa Sukoharjo	1 Paket	200.000.000,00	Kec. Bagor		
15	Pembangunan Drainase desa Sudimoroharjo	Terlaksananya Pembangunan Drainase desa Sudimoroharjo	1 Paket	200.000.000,00	Kec. Wilangan		
16	Pembanguna Drainase jalan Lurah Surodarmo III	Terlaksananya Pembanguna Drainase jalan Lurah Surodarmo III	1 Paket	150.000.000,00	Kec. Nganjuk		
17	Peningkatan jalan lingkungan jalan Lurah Surodarmo III	Terlaksananya Peningkatan jalan lingkungan jalan Lurah Surodarmo III	1 Paket	150.000.000,00	Kec. Nganjuk		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)	LOKASI	KET.
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
18	Pembangunan saluran drainase jalan Citarum IIIa	Terlaksananya Pembangunan saluran drainase jalan Citarum IIIa	1 Paket	150.000.000,00	Kec. Nganjuk	
19	Peningkatan jalan lingkungan jalan Citarum IIIa	Terlaksananya Peningkatan jalan lingkungan jalan Citarum IIIa	1 Paket	150.000.000,00	Kec. Nganjuk	
20	Pembangunan drainase jalan poros dusun Teken	Terlaksananya Pembangunan drainase jalan poros dusun Teken	1 Paket	150.000.000,00	Kec. Loceret	
21	Penataan Drainase dusun Blongko ds. Blongko	Terlaksananya Penataan Drainase dusun Blongko ds. Blongko	1 Paket	150.000.000,00	Kec. Ngetos	
22	Penataan Drainase jalan poros desa oro-oro ombo	Terlaksananya Penataan Drainase jalan poros desa oro-oro ombo	1 Paket	150.000.000,00	Kec. Ngetos	
6	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK			310.000.000		
A.	Peningkatan Sarana Prasarana aparatur					
1	Rehab sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi kanopi gendung kantor	100%	50.000.000	Kesbangpol linmas	untuk penambahan belanja modal kendaraan dinas operasional
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional roda empat	1 buah	260.000.000	Kesbangpol linmas	
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			550.000.000		
A	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan					
1	Gladi Pengamanan Pilkada	Terlaksananya gladi pam pilkada bagi Anggota Satlinmas, kasipem desa, polsek, koramil dalam Pilkada Tahun 2018 di 20 kecamatan	5778 orang	550.000.000	Kab. Nganjuk	
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			297.500.000		
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya alat dan bahan pembersih gedung kantor 28 jenis	12 bln	20.000.000,00	Dinsos, PPPA	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana					

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bln	7.500.000,00	Dinsos, PPPA		
2	Pemeliharaan mebelur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebelur	12 bln	5.000.000,00	Dinsos, PPPA		
C	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial						
1	BOP Beras Bersubsidi	Tersalurkannya beras sejahtera bagi keluarga penerima	82.933 KPM Rastra	265.000.000,00	Dinsos, PPPA	Limpahan dari Disperindag	
9	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI USAHA MIKRO			720.000.000			
A	Program Pembinaan Lingkungan Sosial						
1	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (DBHCHT)	Terlaksananya Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	3.500 m/140 orang	200.000.000	Ds. Patranrejo Kec. Berbek		
2	Pembinaan dan pelatihan keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Kewirausahaan dan Olahhan Makanan Minuman (DBHCHT)	Terlaksananya Pembinaan dan pelatihan keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Kewirausahaan dan Olahhan Makanan Minuman	60 orang	200.000.000	Kec. Nganjuk, Kec. Bagor dan Kec. Gondang		
3	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Servis Sepeda Motor (DBHCHT)	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Servis Sepeda Motor	40 orang	160.000.000	Kec. Sukomoro dan Kec. Wilangan		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
4	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Menjahit (DBHCHT)	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Menjahit	40 orang	160.000.000	Kec. Pace dan Kec. Gondang		
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN			25.000.000			
A	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan						
1	Serap Gabah (Sergap)	Terlaksananya pendampingan serap gabah petani di 20 kecamatan	1 Tahun	10.000.000	Kabupaten Nganjuk	Kegiatan Baru (Dasar Surat Kementrian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No. 198/TU.020/c/02/2017 Tanggal 27 Februari 2017 Hal. Rapat Gabungan Pemantapan Operasionalisasi Serap Gabah Petani; Perpres Nomor 20 Tahun 2017 dan Permentan No. 03/Permentan/PP.200/3/2017 7 Pengadaan alat tester gabah (untuk mengetahui kandungan air, dll.)	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
				3	4		
1	2	3	4	5	6	7	
B	Program Pengembangan Budaya Perikanan						
1	pendampingan pengembangan budidaya perikanan	terlaksananya pendampingan pengembangan budidaya perikanan	1 paket	15.000.000	Kabupaten Nganjuk		
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			1.338.400.000			
A	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup						
1	Pengadaan Tempat Sampah Dorong	Terwujudnya Lingkungan yang bersih dan Nyaman	6 Unit	50.000.000	Taman Pintar, Alun-alun Nganjuk dan Taman Pandan Willis		
2	Rehab Pagar TPA Pandantoyo	Terlaksananya rehab pagar TPA Pandantoyo	1 Paket	200.000.000	Pandantoyo		
3	Pengadaan Tanah urug TPA Kedungdowo	Terlaksananya pengadaan tanah urug TPA Kedungdowo	1 Paket	50.000.000	TPA Kedungdowo		
4	Pembelian tanah untuk TPS 3 R di Kec.Gondang	Terlaksananya pembelian tanah untuk TPS 3R di Kec.Gondang	1 Paket	200.000.000	TPS 3R Kec.Gondang		
5	pembangunan bank sampah kelurahan payaman	Terbangunnya bank sampah kelurahan payaman	1 paket	100.000.000	Kelurahan Payaman		
6	pembangunan TPS Baru Karangsemi	Terbangunnya TPS Baru Karangsemi	1 paket	80.000.000	Kabupaten Nganjuk		
7	monitoring dan evaluasi pengolahan limbah B3	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengolahan limbah B3	1paket	80.000.000	Kabupaten Nganjuk		
B	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						
1	Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	Terlaksananya buku D3TLH	10 Buku	70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		
C	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)						
1	pengkayaan tanaman hutan kota	Terlaksananya penambahan tanaman hutan kota	1 Paket	100.000.000	Kab. Nganjuk		
2	Kegiatan Pemeliharaan dan Peningkatan Fungsi Hutan Kota	Terlaksananya pemeliharaan dan peningkatan fungsi hutan kota	1 Paket	88.400.000	Kab. Nganjuk		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)	LOKASI	KET.
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
D	Program Pengelolaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau					
1	taman eks. Kawedanan warujayeng	terlaksananya pembuatan taman eks.kawedanan warujayeng	1 paket	150.000.000	Kec. Tanjunganom	
2	pengembangan RTH kawasan sekolah (SD dan SMP)	terlaksananya pengembangan RTH Kawasan Sekolah (SD dan SMP)	1 Paket	170.000.000	kab. nganjuk	
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			225.000.000		
A	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan					
1	BOP Program jalan lain menuju mandiri dan sejahtera (Jalin Matra) (BK PROV 2017)	terlaksananya Jalin Matra	55 desa	75.000.000	Kab. Nganjuk	
B	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					
1	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 264 desa dan 20 kecamatan (@desa 2 orang + @kec 1 orang, pelatihan sebanyak 2 kali)	1096 orang	150.000.000	Dinas PMD	Kegiatan baru
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB			10.000.000		
A	Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur					
1	Penambahan Daya Listrik	Terlaksananya penambahan daya listrik	1 lokasi	10.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Pergeseran anggaran dari kegiatan penyediaan alat tulis kantor untuk penambahan daya listrik karena daya listrik tidak mencukupi
14	DINAS PERHUBUNGAN			850.910.000		
A	Program peningkatan disiplin aparatur					
1	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dinas Beserta Perlengkapannya	171 personil (121 PNS, 30 Personil Fasum, 2 personil THL)	35.910.000	Dishub	
B	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan					

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Penyusunan DED Fasilitas Umum Area Parkir khusus Truck Guyangan	Tersusunnya DED Fasilitas Umum Area Parkir khusus Truck Guyangan	1 paket	50.000.000	Area Parkir Khusus Truck Guyangan		
2	Penyusunan DED Fasilitas Umum Terminal MPU Berbek	Tersusunnya DED Fasilitas Umum Terminal MPU Berbek	1 paket	50.000.000	Terminal MPU Berbek		
C	Program peningkatan pelayanan angkutan						
1	Penegakan hukum dan pengawasan laik jalan kendaraan dan perijinan angkutan orang dan barang	Terwujudnya Penegakan hukum dan pengawasan laik jalan kendaraan dan perijinan angkutan orang dan barang	1 paket	15.000.000	Kab. Nganjuk		
D	Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum						
1	Pemasangan LPJU di Kec Kertosono	Terwujudnya Pemasangan LPJU di Pertigaan RM. Mapan / sekitar SMAN I Kertosono	1 Paket	100.000.000	Kec. Kertosono		
2	Pemasangan LPJU di Kec Lengkong	Terwujudnya Pemasangan LPJU di Pertigaan RM. Mapan / sekitar SMAN I Kertosono	1 Paket	200.000.000	Kec. Lengkong		
3	Pemasangan LPJU di Kec Ngronggot	Terwujudnya Pemasangan LPJU di Lingkar Kantor Kec. Ngronggot	1 Paket	200.000.000	Kec. Ngronggot		
4	Pemasangan LPJU di Kec Tanjunganom	Terwujudnya Pemasangan LPJU di Ds. Warujayeng Kec. Tanjunganom	1 Paket	200.000.000	Kec. Tanjunganom		
15	DINAS KOMINFO			2.056.200.000			
A	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Pengadaan perlengkapan kantor	Tersedianya Perlengkapan kantor	100%	81.200.000	Diskominfo	AC, Filing Kabinet, korden	
2	Pengadaan peralatan kantor	Tersedianya Peralatan kantor yang baik	100%	185.000.000	Diskominfo	Laptop, Printer, Fax/Telp, Desktop	
3	Pengadaan Mebelair	Tersedianya Mebelair yang baik	100%	25.000.000	Diskominfo	Kursi Kerja, meja kerja, sofa	
B	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						
1	Pengadaan Sistem Absensi Elektronik	Tersedianya sistem absensi elektronik melalui pemindaian iris mata	100%	1.600.000.000	Diskominfo		
C	Penyebarluasan Informasi						

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pemindahan Tower Triangle PBB dari KPP Pratama Pare ke studio RSAL FM	Terlaksananya Pemindahan Antena Tower Triangle dari KPP Pratama Pare ke Studio Rsal FM	100%	65.000.000	Studio Rsal		
2	Rehabilitasi ruang Radio Suara Anjuk Ladang FM	Terlaksananya rehabilitasi ruang Radio Suara Anjuk Ladang FM	100%	100.000.000	Diskominfo	Untuk pemindahan Radio Suara Anjuk Ladang FM dari Gedung Juang ke Dinas Kominfo	
16	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			85.000.000			
A	Penyelamatan dan pelestarian Dokumen / Arsip Daerah						
1	Penilaian dan penyusutan Arsip	Terlaksananya penyusunan JRA (Jadwal Retensi Arsip)	30 OPD	35.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
B	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan						
1	Penerbitan buku pengolahan potensi lokal	Terwujudnya buku Potensi Daerah	10 buku	50.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
17	DINAS PERTANIAN			225.000.000			
A	Peningkatan Kesejahteraan Petani						
1	Pengembangan Budidaya Serai	Terlaksananya Usaha Budidaya Serai pada Gapoktan/ Poktan/ LMDH	10 ha	200.000.000	Kabupaten Nganjuk	Kegiatan Baru	
B	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Petkebunan Lapangan						
1	Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani Penerima Bantuan UPPO Kabupaten Nganjuk	Terlaksananya peningkatan kompetensi kelompok tani penerima bantuan UPPO	60 orang,	25.000.000	Diperta Nganjuk	Kegiatan Baru	
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			776.160.000			
A	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia						
1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya Bimbingan teknis bagi PNS Dinas Indag Kabupaten Nganjuk	110 Pegawai	125.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengalihan dari Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur di kegiatan pemeliharaan rutin berkala fasilitas umum	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
B	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kemetropolitan	Terwujudnya Pengadaan sarana dan prasarana Kemetropolitan	1 Paket	201.160.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengalihan dari kegiatan Operasional dan Pengembangan UPT Kemetropolitan daerah	
C	Program penataan struktur industri Kajian Potensi Industri	Terlaksananya Penyusunan Kajian Potensi Industri	1 Paket	150.000.000		Pengalihan dari kegiatan Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	
D	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan Masyarakat melalui kegiatan Pelatihan batik, Pelatihan Handycraft, Pelatihan Makanan dan Minuman serta Pelatihan Konveksi	Terwujudnya kemampuan dan ketrampilan bagi masyarakat di lingkungan Industri hasil tembakau	5 Kegiatan	300.000.000		Pengalihan dari Kegiatan Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dari/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau	
19	SEKRETARIAT DAERAH			1.200.000.000			
A	ASISTEN UMUM Peningkatan Sarana dan Pasarana Aparatur						
1	Pengadaan Kendaraan dinas operasional roda 2 (dua)	Terlaksananya pembelian kendaraan dinas operasional roda 2 (dua)	10 Unit kend.roda 2	500.000.000	Pengadaan kend.dinas roda 2 sebanyak 10 unit @ Rp. 50.000.000,-		
2	pengadaan sarana matras lap voli indoor	Terlaksananya pengadaan matras	100%	600.000.000	Kab Nganjuk		
B	Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi kepada Masyarakat						
1	Penyusunan Nganjuk Selayang Pandang	Terlaksananya penyusunan dokumen selayang pandang		50.000.000			
	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA			-			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
A	program pembinaan dan pengembangan aparatur Pelaksanaan peringatan hari jadi provinsi jawa timur di Kab. Nganjuk (BK PROV 2017)	terlaksananya peringatan hari jadi provinsi jawa timur di Kab. Nganjuk (BK PROV 2017)	1 kali	50.000.000	Kab. Nganjuk		
20	SEKRETARIAT DPRD			60.000.000			
A	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Appraisal tunjangan transportasi anggota DPRD sesuai amanat PP Nomor 18 Tahun 2017	Terlaksananya appraisal tunjangan transportasi anggota DPRD sesuai amanat PP Nomor 18 Tahun 2017	1 kegiatan	60.000.000			
21	BAPPEDA			2.875.000.000			
A.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terperuhnya pengadaan kursi tamu di ruangan pejabat dan rak arsip	1 unit	50.000.000	Bappeda Kab. Nganjuk	Kegiatan baru	
B.	Program Pengembangan Data/ Informasi Penetaan lahan ex bengkok untuk cadangan lahan pembangunan	Tersusunnya peta lahan ex bengkok yang berada di Kota Nganjuk dan Kelurahan di Kab. Nganjuk	1 paket	50.000.000	Kelurahan se Kab. Nganjuk	Pengurangan anggaran obyek blj. BBM/Gas dan Pelumas	
C	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						
1	Penyusunan Masterplan Infrastruktur jalan di Kabupaten Nganjuk	Tersusunnya Masterplan Infrastruktur jalan di Kabupaten Nganjuk	1 paket	750.000.000	Kab. Nganjuk	Penyesuaian Judul Kegiatan	
2	Penyusunan Masterplan drainase Perkotaan Nganjuk	Tersusunan Masterplan drainase Perkotaan Nganjuk	1 paket	1.000.000.000	Kab. Nganjuk	Penyesuaian Judul Kegiatan	
3	Koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi dalam perencanaan Pembangunan Kabupaten Nganjuk.	1 paket	50.000.000	Kab. Nganjuk	Kegiatan Baru	
4	Review RPJMD	Tersusunnya dokumen Reniew RPJMD Tahun 2014-2018 Kab. Nganjuk	1 dok	65.000.000	Kelurahan se Kab. Nganjuk	Kegiatan Baru	
D	Program Penelitian dan Pengembangan						
1	Studi Investigasi embung di Kabupaten Nganjuk	Tersusunnya investigasi embung di Kabupaten Nganjuk	1 dokumen	750.000.000	Kab. Nganjuk	Penyesuaian Judul Kegiatan	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
				4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
2	Studi kelayakan bangunan BPKAD	Terlaksananya kegiatan studi kelayakan bangunan BPKAD	100%	60.000.000	Kab. Nganjuk	Kegiatan Baru	
E	Program Perencanaan Tata Ruang						
1	Penyusunan Perumahan Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kab. Nganjuk	Terwujudnya Penyusunan dokumen Perumahan Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kab. Nganjuk	1 dokumen	75.000.000	Kab. Nganjuk		
2	Review Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Nganjuk	Terwujudnya dokumen Review Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Nganjuk	1 dokumen	25.000.000	Kab. Nganjuk		
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			4.000.000			
A	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga berupa peralatan dapur	10 macam	4.000.000	BPKAD		
		TOTAL PAK		213.457.700.293			

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
1	KECAMATAN BERBEK			1.750.000			
A	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
1	1 Penyusunan SAKIB,LPPD,LKJIP	Terlaksananya penyusunan SAKIB,LPPD,LKJIP	1 Tahun	1.750.000	Kec. Berbek	Usulan Kegiatan Baru	
2	KECAMATAN PATIANROWO			15.000.000			
A	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terwujudnya lingkungan bersih dan nyaman	3 bulan	15.000.000	Kec. Patianrowo	untuk hr jasa kebersihan 2orang ; hr jasa administrasi 2 orang pengemudi 1 orang(kekeliruan belum masuk/tercantum di matrik TA 2017)	
3	KECAMATAN LENGKONG			7.500.000			
A	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	1 Pengadaan Meubelair	Terlaksananya Pengadaan Meubelair	1 kali	7.500.000	KECAMATAN LENGKONG		
4	KECAMATAN NGANJUK			20.250.000			
A	Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya belanja alat listrik dan elektronik (Lampu Pijar, dan komponen listrik)		5.000.000	Kec. Nganjuk	Belanja Pengadaan Bola Lampu dll	
2	2 Pengadaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Tersediaanya bahan untuk kebersihan kantor selama 1 tahun		4.000.000	Kec. Nganjuk	Sebelumnya belum ada anggaran	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN (Rp.)		LOKASI	KET.
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
B.	Peningkatan sarana dan Prasarana						
	1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan Korden		5.250.000	Kec. Nganjuk	salah rekening	
	2) Pengadaan Mebelair	Terlaksananya Pengadaan Mebelair (Almari Rak Arsip)		6.000.000	Kec. Nganjuk	Pergeseran mebelair Meja digunakan untuk Rak Arsip	
	TOTAL PAK			44.500.000			

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 ini sebagai acuan dalam menyusun Perubahan KUA -PPAS Tahun 2017 yang merupakan dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2017. Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam pencapaian target-target pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan RKPD berguna untuk penyesuaian acuan agar setiap OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan selalu meningkatkan koordinasi demi terlaksananya sinergi pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Pelaksanaan pembangunan antar sektor dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundangan yang ada dengan berbagai pendekatan perencanaan pembangunan yang ada serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui berbagai forum yang sudah terlembaga. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 akan menjadi Rencana Kinerja bagi OPD dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2017.

Akhirnya dengan perubahan perencanaan ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ELLY HERNATIAS, SH, MHM

Pembina Tk.1

NIP 19661107 199403 1 005